

ANGGARAN

Desakan Audit BPK Menguat

DESAKAN agar BPK melakukan audit terhadap anggaran kunjungan kerja dan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Kalbar menguat.

"Audit untuk meminta kejelasan pertanggungjawaban dana masyarakat tersebut. Sehingga ada ukuran jelas dan bukti fisik kegiatan wakil rakyat besar," ungkap mahasiswa Panca Bhakti



terarah terhadap kegiatan dengan dana Aminudin, Universitas Pontianak, kemarin. Menurut dia, kritik terhadap

mata anggaran itu cukup masuk akal. Pada APBD murni tahun 2012, anggarannya mencapai Rp11.043.092.000,

ILUSTRASI :
SIGIT/PONTIANAKPOST

• ke halaman 15 kolom 2

Desakan Audit BPK Menguat

Sambungan dari halaman 9

namun di perubahan naik menjadi Rp12.449.261.290. "Kenaikannya sampai Rp1,45 miliar. Nilainya fantastis," katanya.

Selain dana kunker, dana program peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dewan juga nilainya tidak signifikan ditengah kondisi Kalbar sekarang ini. Semula di APBD murni dianggarkan sebesar Rp6.507.030.000, akan tetapi naik dalam APBD Perubahan menjadi Rp8.381.867.500.

Aktivis Lembaga Gemawan Hermawansyah menuturkan anggaran besar di pos wakil

rakyat. Kata dia, biasanya program dengan dana besar dari rakyat akan menjadi problem kalau institusi audit reguler seperti BPK melakukan audit kinerja ke pihak pemerintah. Itu karena akan ada ukuran kinerja aparatur diukur dari laporan akuntabilitas pekerjaan. Ketika rapornya biasa dan tidak bagus, kepala daerah seperti gubernur/wali kota/bupati bisa melakukan rotasi atau mutasi. "Istilahnya ada *reward* dan *punishment*. Namun itu tidak terjadi di legislatif," ucapnya.

Problem di legislatif, lanjut dia, tidak adanya instrumen bagaimana mengukur baik

atau tidaknya kinerja kelembagaan atau individu wakil rakyat dengan dana besar. Sebab, bicara akuntabilitas dan pertanggungjawaban, biasanya mewakili aspirasi di dapil pemilihan. Aspirasi seorang wakil rakyat juga harus mampu diakurasi para wakil rakyat buat mendorong perubahan di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Sehingga anggaran yang mendukung sarana dan prasarana mengikuti tugas-tugas wakil rakyat bisa terarah dan diterjemahkan dengan baik," ucapnya. (*den*)